PORTOFOLIO
Jurnal Manajemen dan Bisnis
Vol 4. No. 3 Juli 2025

Pengaruh Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Maria Yenivadia Suryanti[1], **Imar Halimah**[2]
[1) & 2)]Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pamulang
email: suryantisulmi01@gmail.com[1]

Article History
Received: 1/07/2025
Revised: 10/07/2025
Accepted: 12/07/2025

Keywords: ***Local Retribution, Special Allocation Fund, Capital Expenditure***

Abstract: *This study aims to determine and analyze the effect of blood levy and Special Allocation Fund (DAK) on capital expenditure. This study uses a sample of districts / cities in West Java Province contained in the Central Statistics Agency (BPS) in 2019-2023. The sample technique used was purpose sampling, where from 27 districts / cities a sample of 18 districts was obtained for 5 years so that a total of 90 data samples were obtained. The analysis used is panel data regression analysis using a fixed effect model. The results obtained show that simultaneously local retribution and the Special Allocation Fund have a significant effect on capital expenditure. Personally, local retribution and Special Allocation Fund have a positive and significant influence on capital expenditure.*

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian negara bergantung pada kebijakan pemerintah dan tata kelola negara itu sendiri. Pengelolahan perekonomian menjadi tugas utama pemerintah agar terwujudnya kesejahteraan rakyat. Akan tetapi untuk mencapai kesejahteraan tersebut tidak dapat dilakukan apabila hanya dikerjakan oleh satu lembaga pemerintah saja atau yang dikenal dengan istilah pemerintahan absolut yang mana semua kegiatan negara hanya dikendalikan oleh pemerintah pusat. Banyaknya daerah di Indonesia didukung oleh ribuan penduduk membuat pemerintah sedikit kewalahan untuk mengurus dan mengatur keseimbangan perekonomian. Seiring berjalannya waktu, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk membagi tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah supaya memudahkan dalam urusan mensejahterakan rakyat. Sesuai dengan (Setialana, 2014) tentang otonomi daerah yang berarti daerah merupakan bagian desentralisasi yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan.

Desentralisasi merupakan pemindahan sebagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah boleh membuat peraturan daerah secara mandiri sesuai dengan Undang-Undang dan arahan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mengurus sendiri daerahnya sehingga memerlukan dana yang cukup banyak agar terselenggaranya kemakmuran rakyat. Dana yang diterima oleh daerah tidak cukup apabila hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat berupa dana alokasi khusus saja. Kemudian, untuk mempercepat pembangunan daerah pemerintah mengeluarkan aturan terkait pendapatan asli daerah dengan bersumberkan hasil daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah yang dimaksud pemerintah daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil sumber daya daerah setempat.

Sesuai asas otonomi daerah bahwa pendapatan asli daerah akan dikelolah sepenuhnya oleh pemerintah daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat.

Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah dapat mendistribusikan sumber daya yang didapatnya ke belanja modal. Selain itu, pemerintah daerah kemudian mengeluarkan aturan tentang pendapatan asli daerah berupa pajak daerah termasuk salah satunya aturan tentang retribusi daerah. Aturan retribusi daerah dimuat dalam (Ellitan, 2009) tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi daerah dapat dipergunakan semata-mata untuk meningkatkan pelayanan publik daerah seperti terjaminnya kualitas pelayanan umum dan mampu berdaya saing dengan daerah-daerah skitarnya. Pelayanan umum yang dimaksud berupa pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan dan masih banyak lagi. Jumlah retribusi tiap daerah berbeda-beda yaitu disesuaikan dengan peraturan daerah itu sendiri.

Retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah atau penyedia jasa untuk penggunaan barang dan jasa tertentu yang dapat menikmatinya secara langsung. Retribusi daerah adalah biaya yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan yang karena telah menggunakan jasa atau mendapat izin tertentu oleh pemerintah daerah atau penyedia jasa (Muchar, dkk 2023). Retribusi merupakan pungutan fiskal yang diinstitusionalisasikan oleh korporasi pemerintah daerah sebagai kompensasi atas fasilitas layanan publik tertentu. Iuran tersebut diindeksasikan pada parameter kinerja atau mutu pelayanan yang diselenggarakan oleh otoritas lokal, yang manfaatnya secara eksklusif diinternalisasi oleh entitas hukum perseorangan. Prosedur eksekusi pungutan ini dijalankan dengan mengacu pada tatanan normatif yang terformalisasi dalam regulasi perundang-undangan yang mengikat (Halim,2007).

Retribusi daerah dapat dibilang sangat ekonomis karena dalam pemungutannya tidak dikenakan kepada semua orang melainkan hanya orang yang mendapatkan prestasi langsung saja yang akan dikenai iuran tesebut. Sedangkan, menurut UU Nomor 28 tahun 2009 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam hal ini, pemerintah menyediakan jasa atau memberikan izin tertentu untuk dipergunakan oleh siapapun namun tidak mengabaikan kewajiban membayar atas penggunaan tersebut. Retribusi yang disediakan pemerintah daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas, tanggungjawab dan kewenangannya tidak terlepas dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang mengharuskan pemerintah untuk terus meningkatkan pendapatan daerah. Namun terkadang pendapatan asli daerah tidak mampu menutupi belanja tersebut sehingga bantuan pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan dapat membantu pemerintah daerah. Dana alokasi khusus (DAK) merupakan anggaran dari pemerintah pusat untuk disalurkan ke daerah-daerah dengan tujuan tertentu yang bersifat khusus. DAK yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) disalurkan ke daerah bisa berupa dana fisik dan non-fisik. APBN yang disalurkan ke daerah berfungsi untuk pemerataan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi akibat kekurangan dana di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak semata-mata hanya memanfaatkan retribusi daerah saja tetapi juga saluran dana alokasi khusus (DAK) sangat dibutuhkan.

Retribusi daerah dan dana alokasi khusus (DAK) dialokasikan oleh pemerintah daerah kedalam belanja modal sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja modal merupakan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah guna untuk membiayai asset tetap yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan berfungsi untuk menunjang kebutuhan rakyat. Aset tetap yang dimaksud dalam belanja modal berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan aset tidak berwujud. Pemungutan retribusi daerah diselenggarakan oleh setiap daerah yang memiliki izin usaha termasuk pemerintah daerah pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat. Sebagai provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia, kabupaten/kota pada provinsi Jawa Barat membutuhkan dana yang stabil untuk mendukung belanja modal guna menunjang infrastruktur dan pelayanan publik. Struktur pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari retribusi daerah sebagai komponen penting dan DAK sebagai tambahan pendapatan yang membatu daerah. Kedua komponen ini dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan dana dalam proyek pembangunan. Penerimaan retribusi di propinsi Jawa Barat menjadi salah satu pendapatan asli daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Adanya berbagai sektor ekonomi yang terdiri dari pertanian, industri, perdagangan dan jasa sehingga sumber pendapatan memungkinkan meningkat.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat juga memainkan peran penting dalam mendukung proyek-proyek strategis di daerah. Dana alokasi khusus (DAK) dirancang untuk membantu daerah memenuhi kebutuhan pembangunan mereka, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa DAK menguntungkan belanja modal, tetapi pengaruhnya bervariasi tergantung pada konteks lokal dan manajemen keuangan daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa retribusi memiliki pengaruh besar terhadap belanja modal di beberapa wilayah, tetapi hasilnya bervariasi. Penelitian lain menemukan bahwa retribusi selalu memiliki pengaruh besar terhadap belanja modal. Meskipun pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan yang berasal dari retribusi daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan tetapi realisasi belanja modal di beberapa kabupaten/kota pada provinsi Jawa Barat masih menunjukan ketidaksesuaian yang mencolok.

Fenomena ini menimbulkan kesenjangan antara potensi fiskal daerah dengan alokasi anggaran untuk belanja modal yang seharusnya digunakan untuk pembagunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Beberapa kasus terdapat daerah yang memiliki penerimaan retribusi daerah dan DAK yang relatif tinggi namun proporsi belanja modal justru rendah. Sebaliknya terdapat daerah yang penerimaan terbatas namun alokasi belanja modal besar. Ketidaksesuaian ini menjadi tolak ukur bahwa terdapat permasalahan pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, ini menunjukkan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dinamika ini secara khusus di kabupaten/kota propinsi Jawa Barat.

Kesenjangan tersebut memungkinkan sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada variabel-variabel lain seperti pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), atau dana bagi hasil (DBH) serta dilakukan pada lingkup nasional atau provinsi. Selain itu belum banyak penelitian yang melakukan analisis perbandingan antar daerah dengan menggunakan data panel dalam waktu tertentu untuk melihat konsistensi pengaruh retribusi daerah dan DAK terhadap belanja modal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara retribusi dan

DAK terhadap belanja modal pada level pemerintah daerah di Jawa Barat selama periode 2019-2023.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara empiris. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang objektif melalui pengolahan data numerik dan analisis statistik. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang terukur berdasarkan fakta yang diobservasi, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Objek penelitian difokuskan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini dipilih karena memiliki variasi karakteristik fiskal yang cukup beragam, baik dari sisi penerimaan maupun belanja daerah, sehingga relevan untuk menilai keterkaitan antara retribusi daerah, dana alokasi khusus, dan belanja modal. Rentang waktu yang digunakan adalah lima tahun terakhir, yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika fiskal di tingkat daerah.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran dan publikasi resmi Badan Pusat Statistik serta Kementerian Keuangan. Data sekunder dipilih karena lebih mudah diakses, memiliki cakupan luas, serta sudah melalui proses verifikasi dari lembaga pemerintah yang berwenang. Dengan demikian, validitas data dapat lebih terjamin dan mendukung akurasi hasil penelitian. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Metode ini dipilih karena peneliti ingin mengambil sampel yang sesuai dengan kriteria tertentu, yaitu kabupaten dan kota di Jawa Barat yang memiliki data lengkap terkait variabel penelitian selama periode pengamatan. Dengan menggunakan kriteria ini, diharapkan sampel yang diperoleh dapat mewakili populasi dan mendukung tercapainya tujuan penelitian.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu retribusi daerah dan dana alokasi khusus, serta variabel dependen yaitu belanja modal. Retribusi daerah diukur berdasarkan persentase kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan dana alokasi khusus diukur dari proporsi yang diterima oleh pemerintah daerah. Sementara itu, belanja modal diukur dari realisasi pengeluaran pemerintah daerah untuk investasi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana publik. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel. Analisis panel dipilih karena mampu menggabungkan data lintas waktu dengan data lintas daerah, sehingga memberikan informasi yang lebih kaya dibandingkan hanya menggunakan data time series atau cross section. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika perubahan dalam suatu daerah sekaligus membandingkan antar daerah.

Untuk menentukan model terbaik, dilakukan serangkaian uji seperti uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Hasil dari pengujian ini digunakan untuk memastikan apakah model yang paling sesuai adalah common effect, fixed effect, atau random effect. Model yang terpilih kemudian diestimasi menggunakan perangkat lunak statistik EViews, sehingga hasil analisis dapat diperoleh secara lebih presisi. Selain itu, pengujian asumsi klasik juga dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Langkah ini penting agar hasil analisis tidak bias dan dapat

memberikan gambaran yang akurat mengenai hubungan antar variabel. Dengan metode yang sistematis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan literatur akademik maupun praktik pengelolaan keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan berdasarkan data yang telah ditabulasi, kemudian diolah menggunakan EViews 12 untuk memudahkan penjelasan setiap variabel. Gambaran data ditunjukkan melalui nilai mean, median, maksimum, dan minimum.

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistik	Belanja Modal (Y)	Retribusi Daerah (X1)	Dana Alokasi Khusus (X2)
Rata-rata (Mean)	4,22E+08	0,052854	0,616520
Median	3,41E+08	0,042220	0,491720
Maksimum	1,31E+09	0,294688	2,307905
Minimum	10.499.784	0,009204	0,021864
Standar Deviasi	3,07E+08	0,043343	0,527335
Skewness	1,002174	3,218928	1,035234
Kurtosis	3,266952	1,536683	3,469,451
Uji Jarque-Bera	1,533254	7,289423	1,690208
Probabilitas	0,000468	0,000000	0,000214
Jumlah (Sum)	3,80E+10	4,756862	5,548680
Jumlah Kuadrat Deviasi	8,41E+18	0,167197	2,474936
Jumlah Observasi	90	90	90

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, belanja modal (Y) memiliki nilai rata-rata yang cukup besar dengan standar deviasi lebih kecil dari rata-rata, sehingga menunjukkan variasi data relatif rendah dan cenderung stabil antar kabupaten/kota selama periode penelitian. Nilai minimum tercatat di Kabupaten Garut, sedangkan nilai maksimum terdapat di Kabupaten Majalengka. Untuk retribusi daerah (X1), nilai rata-rata relatif kecil dengan standar deviasi yang tidak terlalu jauh dari rata-rata, menandakan perbedaan antar daerah tidak terlalu tinggi.

Nilai terendah ditemukan di Kabupaten Garut, sedangkan nilai tertinggi ada di Kabupaten Kuningan. Sementara itu, dana alokasi khusus (X2) menunjukkan rata-rata yang cukup tinggi dengan variasi sedang. Nilai terendah tercatat di Kabupaten Bandung, sedangkan nilai tertinggi terdapat di Kabupaten Ciamis. Secara keseluruhan, distribusi data pada ketiga variabel memperlihatkan kecenderungan stabil tanpa fluktuasi ekstrem.

B. Pengujian Data Panel

Common Effect Model

Common Effect Model atau Pooled merupakan metode estimasi yang menggabungkan data time series dan cross section menggunakan OLS. Model ini mengabaikan dimensi waktu dan individu, dengan asumsi perilaku data seragam sepanjang periode. Amaliah dkk. (2020) menyebut OLS sebagai metode populer dalam mengukur persamaan regresi.

Tabel 2. Hasil Uji CEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.29E+08	60346288	7.113209	0.0000
X1	2.31E+08	7.75E+08	0.297718	0.7666
X2	-31605064	63697596	-0.496174	0.6210

R-squared	0.003287	Mean dependent var	4.22E+08
Adjusted R-squared	-0.019626	S.D. dependent var	3.07E+08
S.E. of regression	3.10E+08	Akaike info criterion	41.97725
Sum squared resid	8.38E+18	Schwarz criterion	42.06057
Log likelihood	-1885.976	Hannan-Quinn criter.	42.01085
F-statistic	0.143459	Durbin-Watson stat	0.624037
Prob(F-statistic)	0.866561		

Berdasarkan hasil regresi dengan model common effect, nilai probabilitas F-statistik lebih besar dari taraf signifikansi sehingga secara simultan retribusi daerah dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara parsial, baik retribusi daerah maupun dana alokasi khusus juga menunjukkan probabilitas di atas batas signifikansi, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Nilai R-squared yang sangat kecil menunjukkan bahwa kemampuan kedua variabel independen dalam menjelaskan variasi belanja modal sangat terbatas, sementara sebagian besar variasi dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Fixed Effect Model (FEM)

Fixed Effect Model (FEM) merupakan metode estimasi data panel dengan menambahkan variabel dummy untuk menangkap perbedaan antar entitas yang tidak dapat diamati langsung. Model ini digunakan ketika terdapat korelasi antara efek individual dan variabel independen, dengan membedakan nilai intersep tiap unit namun tetap mengasumsikan slope regresi konstan di seluruh unit (Amaliah dkk., 2020).

Tabel 2. Hasil Uji FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.39E+08	59985253	2.318132	0.0234
X1	3.77E+09	9.08E+08	4.157060	0.0001
X2	1.35E+08	43949387	3.078333	0.0030
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.811517	Mean dependent var		4.22E+08
Adjusted R-squared	0.760358	S.D. dependent var		3.07E+08
S.E. of regression	1.50E+08	Akaike info criterion		40.68957
Sum squared resid	1.58E+18	Schwarz criterion		41.24508
Log likelihood	-1811.031	Hannan-Quinn criter.		40.91358
F-statistic	15.86247	Durbin-Watson stat		2.371525
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil estimasi Fixed Effect Model menunjukkan bahwa secara simultan retribusi daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Secara parsial, kedua variabel juga signifikan dengan arah pengaruh positif, yang berarti peningkatan retribusi maupun dana alokasi khusus mendorong peningkatan belanja modal. Nilai R-squared yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar variasi belanja modal dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model.

Random Effect Model

Random Effect Model (REM) adalah model regresi data panel yang mengasumsikan koefisien tetap, sedangkan intersep berbeda antar individu maupun waktu. Model ini memandang perbedaan antar unit sebagai bagian dari error term, sehingga lebih efisien dibanding *Fixed Effect Model* ketika jumlah variabel dummy besar dan degree of freedom berkurang.

Tabel 3. Hasil Uji REM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.14E+08	83692417	2.559097	0.0122
X1	2.69E+09	7.97E+08	3.374739	0.0011
X2	1.07E+08	42430678	2.510590	0.0139
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			2.74E+08	0.7678
Idiosyncratic random			1.50E+08	0.2322
Weighted Statistics				
R-squared	0.152157	Mean dependent var		1.01E+08
Adjusted R-squared	0.132667	S.D. dependent var		1.67E+08
S.E. of regression	1.56E+08	Sum squared resid		2.11E+18
F-statistic	7.806679	Durbin-Watson stat		1.883371
Prob(F-statistic)	0.000762			

Hasil estimasi Random Effect Model menunjukkan bahwa secara simultan retribusi daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Secara parsial, kedua variabel juga signifikan dengan arah positif, sehingga peningkatan keduanya mendorong kenaikan belanja modal. Nilai R-squared sekitar lima belas persen mengindikasikan bahwa kontribusi retribusi daerah dan dana alokasi khusus dalam menjelaskan variasi belanja modal terbatas, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian.

C. Pemilihan Model Terbaik

Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk membandingkan Common Effect Model dengan Fixed Effect Model. Jika p-value lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan model yang tepat adalah CEM. Sebaliknya, jika p-value lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima sehingga FEM yang dipilih (Irmeiyana, 2024).

Tabel 4. Hasil Uji Chow

Jenis Uji	Statistik	Derajat Bebas (d.f.)	Probabilitas
Cross-section F	17,656836	(17,70)	0,0000
Cross-section Chi-square	149,891121	17	0,0000

Berdasarkan tabel 4, nilai p-value lebih kecil dari 0,05 sehingga model yang tepat adalah Fixed Effect Model (FEM). Selanjutnya analisis dilanjutkan dengan Uji Hausman.

Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk membandingkan Random Effect Model dan Fixed Effect Model. Jika nilai probabilitas < 0,05 maka dipilih FEM, sedangkan jika > 0,05 maka dipilih REM.

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

Ringkasan Uji	Statistik Chi-Square	Derajat Bebas (d.f.)	Probabilitas
Cross-section random	8,150262	2	0,0170

Hasil uji Chow dan uji Hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, sehingga model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Dengan demikian, FEM dinyatakan sebagai model terbaik dan paling tepat digunakan dalam penelitian ini, sehingga uji Lagrange Multiplier tidak perlu dilakukan.

D. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Menurut Ghozali (2016), variabel dikatakan normal jika p-value > 0,05 dan tidak normal jika p-value < 0,05.

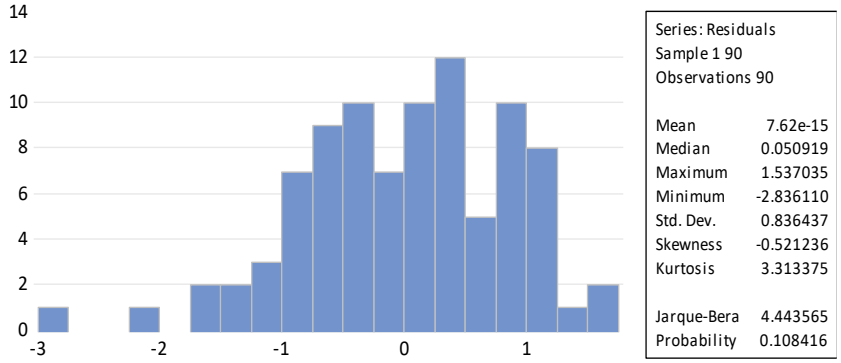

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Data dinyatakan berdistribusi normal dengan probability sebesar 0,108416, berdasarkan 18 kabupaten/kota dengan total 90 observasi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel independen. Menurut Ghozali (2016), hal ini dilihat dari nilai toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF), di mana toleransi rendah atau VIF tinggi menunjukkan adanya kolinearitas. Cutoff yang digunakan adalah toleransi < 0,10 atau VIF > 10. Multikolinearitas dapat menyebabkan standar error besar sehingga uji t menjadi tidak signifikan (Zafira & Sastri, 2023).

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Varian Koefisien	Uncentered VIF	Centered VIF
Konstanta (C)	3,64E+15	3,402205	NA
Retribusi Daerah (X1)	6,01E+17	2,609848	1,042382
Dana Alokasi Khusus (X2)	4,06E+15	2,483169	1,042382

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai Centered VIF variabel X_1 dan X_2 sekitar 1, jauh di bawah ambang 10. Mengacu pada Gujarati (2003), hal ini menandakan tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi. Dengan demikian, variabel independen tidak memiliki hubungan linier yang kuat dan masing-masing memberikan kontribusi unik terhadap variabel dependen. Kondisi ini memastikan model bebas dari masalah multikolinearitas sehingga estimasi regresi valid untuk dilanjutkan ke tahap uji asumsi klasik berikutnya dan pengujian hipotesis.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya ketidaksamaan varian residual dalam model regresi. Menurut Ghozali (2016), model dinyatakan baik jika bebas dari heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan metode Breusch-Pagan-Godfrey untuk memastikan apakah model memenuhi asumsi tersebut.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Statistik Uji	Nilai	Probabilitas
F-statistik	0,392027	0,6769
Obs*R-squared	0,803847	0,6690
Scaled explained SS	0,853137	0,6527

Hasil uji Breusch-Pagan-Godfrey menunjukkan seluruh probabilitas lebih besar dari 0,05, sehingga H_0 tidak ditolak. Dengan demikian, model regresi terbukti bebas dari heteroskedastisitas, varians residual konstan, dan model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi residual antara periode t dan t-1. Menurut Ghozali (2016), model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi. Pengujian dapat dilakukan dengan Durbin-Watson, di mana nilai antara -2 hingga 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi (Pratama dkk., 2021; Zafira & Sastri, 2023).

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

Statistik	Nilai	Statistik	Nilai
R-squared	0,318402	Mean variabel dependen	-3,77E-08
Adjusted R-squared	0,286327	Standar deviasi dependen	3,07E+08
Std. Error of Regression	2,59E+08	Akaike Info Criterion	4,163838
Jumlah Kuadrat Residual	5,71E+18	Schwarz Criterion	4,177726
Log Likelihood	-1,868727	Hannan-Quinn Criterion	4,169438
F-statistik	9,926728	Durbin-Watson Statistik	1,986454
Probabilitas (F-statistik)	0,000001		

Nilai Durbin-Watson sebesar 1,986454 mendekati 2, sehingga model bebas dari autokorelasi dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

E. Analisis Regresi Data Panel

Persamaan Regresi

Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta melihat perubahan variabel dependen saat variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan (Listiani dkk., 2023). Substituted Coefficients:

$$Y = 1.3905\ (c) + 3.7745*X1 + 1.3529*X2$$

Hasil regresi menunjukkan konstanta sebesar 1,3905 yang menggambarkan nilai belanja modal saat variabel independen bernilai nol. Koefisien retribusi daerah sebesar 3,7745 menandakan bahwa setiap kenaikan retribusi daerah berkontribusi positif terhadap peningkatan belanja modal. Sementara itu, koefisien dana alokasi khusus sebesar 1,3529 juga menunjukkan

pengaruh positif, di mana peningkatan dana alokasi khusus mendorong kenaikan belanja modal dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2018), uji ini menilai kontribusi individual variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen, dengan keputusan didasarkan pada perbandingan nilai t-hitung dan t-tabel pada taraf signifikansi 5%.

Tabel 9. Hasil Uji T

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Probabilitas
Konstanta (C)	1,39E+08	59.985253	2,318132	0,0234
Retribusi Daerah (X1)	3,77E+09	9,08E+08	4,157060	0,0001
Dana Alokasi Khusus (X2)	1,35E+08	43.949387	3,078333	0,0030

Hasil uji t menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, ditunjukkan oleh koefisien positif dengan p-value < 0,05. Demikian pula, dana alokasi khusus juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dengan p-value < 0,05.

Uji F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Menurut Listiani dkk. (2023), jika F-hitung < F-tabel pada $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan Ha ditolak, sebaliknya jika F-hitung > F-tabel maka H_0 ditolak dan Ha diterima.

Tabel 10. Hasil Uji F

Statistik	Nilai	Statistik	Nilai
R-squared	0,811517	Mean variabel dependen	4,22E+08
Adjusted R-squared	0,760358	Standar deviasi dependen	3,07E+08
Std. Error of Regression	1,50E+08	Akaike Info Criterion	4,068957
Jumlah Kuadrat Residual	1,58E+18	Schwarz Criterion	4,124508
Log Likelihood	-1,81,031	Hannan-Quinn Criterion	4,091358
F-statistik	**1,586247**	Durbin-Watson Statistik	2,371525
Probabilitas (F-statistik)	**0,000000**		

Hasil uji F menunjukkan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Jika nilai R^2 kecil maka kemampuan penjelasan

terbatas, sedangkan nilai yang mendekati 1 menunjukkan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dengan baik (Listiani dkk., 2023; Ghozali, 2018).

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Statistik	Nilai	Statistik	Nilai
R-squared	**0,811517**	Rata-rata variabel dependen	4,22E+08
Adjusted R-squared	**0,760358**	Standar deviasi variabel dependen	3,07E+08
Std. Error of Regression	1,50E+08	Akaike Info Criterion	4,068,957
Jumlah Kuadrat Residual	1,58E+18	Schwarz Criterion	4,124,508
Log Likelihood	-1,811,031	Hannan-Quinn Criterion	4,091,358
F-statistik	1,586,247	Durbin-Watson Statistik	2,371,525
Probabilitas (F-statistik)	0,000000		

Nilai R-squared sebesar 0,811517 menunjukkan bahwa sekitar 81,15% variasi variabel Y dijelaskan oleh variabel independen dalam model, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model.

F. Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar penerimaan retribusi daerah, semakin meningkat pula alokasi belanja modal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah berperan penting dalam menyediakan ruang fiskal bagi pemerintah kabupaten dan kota, khususnya di Provinsi Jawa Barat, untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan. Hal ini menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan retribusi daerah dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam menyediakan layanan publik yang lebih memadai.

Keterkaitan antara retribusi daerah dan belanja modal sejalan dengan pandangan bahwa kontribusi masyarakat melalui pembayaran retribusi mencerminkan bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah. Ketika penerimaan dari sektor retribusi meningkat, pemerintah memiliki landasan fiskal yang lebih kuat untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai program pembangunan lainnya. Dengan demikian, retribusi daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu mendorong peningkatan kualitas pembangunan di tingkat lokal.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan kajian empiris sebelumnya yang dilakukan oleh sejumlah peneliti yang menegaskan bahwa retribusi daerah memberikan pengaruh positif terhadap belanja modal. Keselarasan dengan penelitian terdahulu memperkuat keyakinan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan besarnya ruang fiskal daerah. Hal ini menunjukkan bahwa temuan penelitian ini tidak hanya bersifat kebetulan, tetapi juga memiliki dasar empiris yang kuat. Selain retribusi daerah, penelitian ini menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus turut memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi instrumen

pemerintah pusat dalam mendukung pembiayaan kegiatan tertentu di daerah. Kehadiran dana ini memberikan dukungan yang signifikan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang tidak dapat sepenuhnya ditanggung melalui pendapatan asli daerah.

Dana Alokasi Khusus memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas belanja modal karena sifatnya yang diarahkan pada kegiatan-kegiatan tertentu dengan standar nasional. Melalui dukungan dana tersebut, pemerintah daerah dapat meningkatkan penyediaan infrastruktur, layanan publik, serta program pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, DAK tidak hanya menjadi instrumen transfer fiskal, tetapi juga sarana yang memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan. Temuan ini juga sesuai dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa transfer fiskal yang bersifat earmarked mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan. Dengan adanya konsistensi temuan antara penelitian ini dan kajian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa DAK merupakan salah satu faktor penting dalam menjelaskan variasi belanja modal pemerintah daerah.

Lebih lanjut, hasil penelitian memperlihatkan bahwa retribusi daerah dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Kombinasi antara sumber penerimaan asli daerah dan transfer fiskal dari pusat membentuk sinergi yang memperkuat kapasitas fiskal daerah. Retribusi daerah menyediakan dukungan dari sisi partisipasi masyarakat, sedangkan Dana Alokasi Khusus memberikan jaminan pembiayaan dari pemerintah pusat untuk kegiatan tertentu. Sinergi keduanya memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal secara lebih efektif dan berkesinambungan. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pengelolaan retribusi daerah dan Dana Alokasi Khusus dalam rangka meningkatkan belanja modal daerah. Optimalisasi kedua sumber penerimaan ini akan berimplikasi langsung terhadap peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian yang serius terhadap pengelolaan retribusi daerah serta memastikan penggunaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan prioritas pembangunan. Dengan demikian, keberlanjutan pembangunan daerah dapat terjamin dan tujuan peningkatan kesejahteraan publik dapat tercapai secara optimal.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh retribusi daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2019 hingga 2023. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, hanya delapan belas kabupaten/kota yang dipilih dari total dua puluh tujuh wilayah, karena tidak semua memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan regresi data panel menggunakan perangkat lunak EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial retribusi daerah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menegaskan bahwa semakin besar penerimaan retribusi daerah, semakin luas pula kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan belanja modal lainnya.

Selain itu, Dana Alokasi Khusus juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Temuan ini mengindikasikan bahwa transfer fiskal dari pemerintah pusat melalui DAK mampu meningkatkan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai program-program prioritas dan pembangunan yang bersifat strategis. Lebih lanjut, penelitian ini juga membuktikan bahwa retribusi daerah dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yang menunjukkan adanya sinergi antara penerimaan asli daerah dan dukungan fiskal dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Variabel yang digunakan masih terbatas, periode penelitian relatif singkat, serta jumlah sampel tidak mencakup seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Oleh karena itu, penelitian mendatang diharapkan dapat memperluas cakupan variabel, menambah periode waktu, serta menggunakan sampel yang lebih representatif. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi serta mengelola Dana Alokasi Khusus secara efektif guna mendukung peningkatan belanja modal yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Amaliah, E. N., Darnah, D., & Sifriyani, S. (2020). "Regresi Data Panel dengan Pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect model (FEM) dan Random Effect Model (REM) (Studi Kasus: Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2015-2018)," *Estimasi: Journal of Statistics and Its Application*, 1(2), 106.

Amelia, Y., & Azizah, A. (2023). "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2017," *Studia Ekonomika*, 21(1), 81–100.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Setneg

Farhan, M. (2024). "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal," Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, 2(1).

Ghozali, Imam dan Ratmono, Dwi (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Halimah, I., Sanulika, A., & Hidayati, W. N. (2025). "Antara Tangguhan dan Transparansi: Peran Moderasi Sustainability Reporting dalam Menekan Agresivitas Pajak," *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 1097–1106.

Listiani, S. R., Afif, M. N., & Aziz, A. J. (2023). "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi Tahun 2011-2021," *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(5), 111–124.

Nurina Zhafira, & Enan Trivansyah Sastri. (2023). "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali," *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 306–313.

Pratama, S. A., Kristiyanti, L., & Pardanawati, S. L. (2021). "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019," *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(02), 749–751.

Ramlan, Darwanis, & Abdullah, S. (2016). "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi

pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)," Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 10(2), 79.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Pemerintahan Daerah. Jakarta: Setneg.

Sudika, I. K., & Budiartha, I. K. (2017). "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali," *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(2), 1689–1718.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmawati, N., & Naryono, E. (2021). "Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kota Sukabumi," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 23–43.

Trisnani, S. A., & Isthika, W. (2022). "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018," *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 11(1), 26.

Widiani, D., Zahro, N. I & Susanti, D. A (2022). "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah,". *Jurnal Akuntansi Publik*, 13, 45–52.